



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Received February 13, 2026, Accepted March 20, 2026, Published March 31, 2026

Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dalam Perspektif Sosiologi Kebencanaan Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Parittiga

Wahyu Ardiansyah¹, Romi Mesra²

¹Universitas Terbuka, Indonesia
E-mail: Ardiansyahwahyu271@gmail.com

²Universitas Negeri Manado, Indonesia
E-mail: romimesra@unima.ac.id

Abstract

Flooding is a recurring social issue in West Bangka Regency, particularly in Parittiga District. This phenomenon is not solely caused by natural factors but is also influenced by the dynamics of social interactions, environmental management, and suboptimal public policies. This study aims to examine and evaluate the performance of the West Bangka Regency Social Service in implementing post-flood social welfare services using a sociological perspective. This research approach applies qualitative methods through in-depth interviews and field observations, as well as a literature review to sharpen the analysis. The research findings indicate that the Social Service plays a crucial role in emergency response and social rehabilitation through the formation of Disaster Preparedness Cadets (TAGANA), the provision of logistical assistance, and the implementation of rapid response measures for affected communities. However, obstacles remain, such as delays in aid distribution, uneven distribution of beneficiaries, and a lack of attention to vulnerable groups such as the elderly. This study recommends the need for strengthened cross-agency coordination and transparency of aid recipient data. Furthermore, community capacity building is needed to make post-disaster social services more efficient, responsive, and equitable.

Keywords: Social Services, Performance Evaluation, Disaster Sociology, TAGANA

Abstrak

Bencana banjir merupakan isu sosial yang kerap muncul di Kabupaten Bangka Barat, terutama di Kecamatan Parittiga. Fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah akan tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika interaksi sosial dan pengelolaan lingkungan serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial pascabencana banjir dengan menggunakan sudut pandang sosiologi bencana. Pendekatan penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan serta kajian pustaka sebagai sarana untuk mempertajam analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memegang peran krusial dalam respons darurat dan rehabilitasi sosial melalui pembentukan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan penyediaan bantuan logistik serta pelaksanaan tindakan tanggap cepat bagi masyarakat terdampak. Tetapi masih terdapat kendala seperti keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan ketidakmerataan penerima manfaat serta kurangnya perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia dan minimnya pendampingan psikososial bagi masyarakat korban banjir. Kajian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi lintas instansi dan keterbukaan data penerima bantuan. Selain itu perlunya pengembangan kapasitas masyarakat agar pelayanan sosial pascabencana menjadi lebih efisien, responsif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Evaluasi Kinerja, Sosiologi Kebencanaan, TAGANA

A. Pendahuluan

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Parittiga dikategorikan sebagai isu sosial dan lingkungan. Bencana ini bersifat berulang disebabkan oleh interaksi antara unsur-unsur alamiah dan kegiatan manusia dikawasan dataran rendah serta sistem drainase yang

kurang memadai terhadap genangan air saat intensitas curah hujan meningkat. Menurut Sutanto & Mulyana (2020) Kegiatan eksplorasi timah dan konversi lahan menjadi areal perkebunan telah mengakibatkan turut memperparah kemampuan tanah dalam menyerap air serta mempercepat proses runoff permukaan. Akumulasi sedimen di aliran sungai serta pembangunan pemukiman di tepian sungai berkontribusi pada penurunan kapasitas debit air. Akibatnya berpotensi terjadinya banjir dan menimbulkan kerusakan ekosistem serta mengurangi taraf kesejahteraan penduduk di daerah pesisir Bangka Belitung.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial memegang peran penting tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 dalam menyediakan perlindungan sosial dan menangani korban serta memulihkan masyarakat pascabencana. Menurut Tumber (2014) Partisipasi masyarakat dan legitimasi lembaga publik menjadi faktor keberhasilan peran ini. Dari bulan Agustus tahun lalu sampai Agustus 2025 ketinggian air 1 sampai 1,5 meter terjadi di Kecamatan Parittiga maka perlunya keaktifan Dinas Sosial dalam mitigasi dan pemulihan sosial akibat banjir. Ini meliputi kerusakan rumah dan lahan pertanian serta fasilitas umum yang dampaknya juga meluas pada sektor pendidikan dan ekonomi maupun kesehatan karena penyakit seperti diare dan kulit.

Tabel 1

Data Frekuensi Banjir Kabupaten Bangka Barat Menurut Tahun 2024

NO	KECAMATAN	FREKUENSI BENCANA BANJIR
1	MUNTOK	SEDANG
2	SIMPANG TERITIP	RENDAH
3	JEBUS	RENDAH
4	PARITTIGA	TINGGI
5	KELAPA	RENDAH
6	TEMPILANG	RENDAH

Sumber : (Adhian Zulhajjany,2025)

Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dalam penanganan dan pemulihan sosial pascabanjir. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas evakuasi dan distribusi bantuan serta pemulihan psikologis korban. Akan tetapi sering menghadapi hambatan seperti hal berikut, 1) keterlambatan, 2) ketidakmerataan, dan 3) ketidakadilan layanan bagi kelompok rentan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian melalui wawancara dan observasi serta kajian literature. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dari perspektif sosiologi bencana. Selain itu juga menyoroti hubungan struktur social dan kebijakan public serta perilaku masyarakat. Hasilnya diharapkan memberi rekomendasi peningkatan efektivitas layanan sosial dan memperkaya literatur evaluasi kebijakan pascabencana di Kecamatan Parittiga (Dynes, 1998).

Beberapa studi sebelumnya membahas isu serupa yaitu Program One Agency One Innovation di Kabupaten Wajo yang menekankan peningkatan kualitas layanan publik telah diteliti oleh (Syam, Patmasari, & Anugrah, 2021). Kinerja Dinas Sosial Kota Padang dalam penanggulangan bencana yang menilai hal berikut, 1) efektivitas, 2) efisiensi, dan 3) kesiapsiagaan instansi dikaji oleh (Putra & Alhadi, 2019). Peran dan temuan mengenai keterbatasan regulasi serta fasilitas di tingkat lokal Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dibahas oleh (Irtanto, 2022). Meskipun studi-studi tersebut berkontribusi dalam memahami kinerja Dinas Sosial. Penelitian masih berfokus pada aspek administratif dan koordinasi antarlembaga serta efektivitas penyaluran bantuan tanpa menyoroti secara mendalam dimensi sosial dan partisipasi masyarakat terdampak. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang menelaah bagaimana kebijakan dan praktik pelayanan kesejahteraan sosial diterapkan di tingkat lokal dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya serta kebutuhan kelompok rentan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut maka studi ini menawarkan inovasi serta kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologi bencana dan evaluasi kinerja lembaga publik dalam konteks layanan sosial pascabanjir di Kecamatan Parittiga. Penelitian ini bertujuan menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dengan menekankan efektivitas TAGANA dan akurasi distribusi bantuan serta pemerataan layanan bagi kelompok rentan atau tingkat kepuasan masyarakat terdampak. Kondisi lapangan menunjukkan tantangan seperti koordinasi antarinstansi yang lemah dan keterlibatan masyarakat lokal yang minim dalam pemulihan sosial. Beberapa warga melaporkan ketidakmerataan bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme layanan agar lebih responsif dan adil serta merata. Dengan demikian maka penelitian ini tidak hanya menilai aspek teknis penanganan banjir akan tetapi juga mengeksplorasi dimensi sosial dan partisipatif sebagai dasar keberhasilan kebijakan publik di tingkat lokal (Turner, 2014).

B. Tinjauan Literatur

1. Teori Sosiologi Kebencanaan (Disaster Sociology Theory)

Menurut Ahli Sosialisasi Kebencanaan (Dynes, 1998) bahwa Disaster Sociology Theory menjelaskan bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam akan tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi struktur social dan perilaku manusia serta kelembagaan. Bencana mencerminkan kemampuan masyarakat dalam berkoordinasi dan bersolidaritas serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut (Turner, 2014) bahwa bencana terjadi akibat failures of foresight atau kegagalan sosial mengantisipasi risiko yang diperburuk oleh kerentanan sosial (ketimpangan, lemahnya tata kelola, dan minimnya partisipasi masyarakat). Berdasarkan pandangan tersebut bahwa teori sosiologi kebencanaan digunakan untuk menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dari aspek teknis maupun social yaitu termasuk relasi pemerintah maupun masyarakat dan pemerataan bantuan serta peran TAGANA. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan banjir bergantung pada legitimasi social dan kepercayaan public maupun kolaborasi lokal yang inklusif.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian program atau kebijakan terhadap tujuan yang ditetapkan dengan fokus pada efektivitas dan dampak. Dalam penelitian ini maka evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kekurangan Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dalam menangani dampak sosial pascabencana banjir. Baik secara administratif maupun manfaat yang dirasakan masyarakat. Tujuannya mencakup penilaian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan identifikasi hambatan dan faktor pendukung serta penyediaan dasar bagi perbaikan kebijakan penanggulangan bencana sosial di masa mendatang (Nurhayati & Prabowo, 2020).

3. Kinerja

Kinerja atau performance adalah tingkat pencapaian individu maupun organisasi menjalankan tugasnya (produktivitas, kualitas layanan, efisiensi dan responsivitas) dalam instansi pemerintah (Mahmudi, 2015). Kinerja Dinas Sosial dapat dinilai dari kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan. Selain itu juga koordinasi dengan BPBD dan TAGANA serta pemerintah desa. Kualitas layanan kepada warga terdampak dan kemampuan membangun solidaritas social juga bagian dari kinerja dinas sosial. Kinerja yang efektif tidak hanya dilihat dari output seperti bantuan yang diberikan akan tetapi juga dari outcome sosial berupa pemulihan masyarakat secara social dan ekonomi serta psikologis.

4. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang social yang termasuk didalamnya mengenai penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kelompok rentan serta penanganan bencana dari aspek sosial (tanggap darurat, pemulihan, dan rehabilitasi). Dinas Sosial berperan menyediakan bantuan sosial dan logistic Banjir yang terjadi di Kecamatan Parittiga serta melakukan

pendataan korban dengan tujuan berkoordinasi lintas sektor untuk pemulihan sosial (Sulastri & Handayani, 2021).

5. Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki topografi dataran rendah yang rentan banjir akibat penambangan timah dan alih fungsi lahan serta curah hujan tinggi. Kondisi ini meningkatkan kerentanan sosial dan ekologis sehingga pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyusun kebijakan penanggulangan bencana dan memberdayakan masyarakat serta memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif termasuk peran Dinas Sosial (Hidayat & Rahmawati, 2022).

6. Perspektif Sosiologi Kebencanaan

Perspektif sosiologi kebencanaan mempelajari hubungan masyarakat dengan bencana serta dampaknya terhadap struktur sosial dan perilaku serta kebijakan publik. Ini menekankan bahwa bencana muncul dari interaksi faktor (social, budaya, ekonomi, dan politik) menurut (Dynes, 1998; Turner, 2014). Kerentanan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan memperburuk dampak bencana. Disisi lain respons sosial dan kebijakan menentukan keberhasilan pemulihan. Perspektif ini digunakan dengan tujuan untuk menganalisis respons masyarakat Parittiga. Untuk melihat bagaimana Dinas Sosial memahami dimensi sosial dalam pemulihan. Selain itu menilai pengaruh interaksi sosial dan budaya lokal serta kebijakan publik terhadap efektivitas penanganan pascabencana.

7. Pasca Banjir

Pasca banjir adalah fase pemulihan yang mencakup pemulihan sosial-ekonomi sampai pemulihan psikologis dari trauma serta rehabilitasi infrastruktur sosial seperti rumah dan fasilitas umum. Dalam tahap ini bahwa Dinas Sosial berperan penting melalui penyaluran bantuan dan pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak serta pembentukan kelompok sosial pendukung atau program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan sosial (Putri & Santosa, 2021).

8. Kecamatan Parittiga

Kecamatan Parittiga merupakan wilayah di Kabupaten Bangka Barat yang sering dilanda banjir akibat curah hujan tinggi. Sistem drainase buruk dan penambangan timah serta alih fungsi lahan yang dimiliki masyarakat rentan terhadap dampak ekonomi bencana. Ketergantungan tinggi pada sumber daya alam membuat mereka mudah terdampak karena itu lokasi ini ideal untuk menilai kinerja Dinas Sosial dan peran struktur sosial dalam pemulihan pascabencana (Yuliani & Fadillah, 2020).

C. Metode

Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini melalui teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap tujuh masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka terkait kinerja Dinas Sosial dalam penanganan pascabencana. Baik dimulai dari respons darurat dan distribusi bantuan hingga rehabilitasi sosial dan psikologis. Melalui interaksi langsung oleh peneliti berupaya memahami makna dan proses yang dialami masyarakat secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai kondisi lapangan (Sugiyono, 2019).

Penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Peneliti menjadi instrumen utama yang aktif dalam pengumpulan dan analisis serta interpretasi data. Melalui wawancara mendalam dan observasi bahwa peneliti menggali makna di balik perilaku dan pengalaman partisipan sehingga hasil penelitian tidak hanya memuat fakta empiris akan tetapi juga konteks sosial dan nilai yang membentuk pengalaman masyarakat terhadap penanganan bencana (Agustini et al., 2023).

Pendekatan sosiologi kebencanaan digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan relasi kekuasaan hingga partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas penanganan bencana. Pendekatan ini

melihat bencana sebagai proses sosial yang melibatkan actor dan lembaga serta konteks budaya sehingga wawancara dan observasi tidak hanya menyoroti penerimaan bantuan akan tetapi juga persepsi masyarakat tentang keadilan dan transparansi hingga hubungan mereka dengan pemerintah (Rijanta et al., 2018; Dynes, 1994). Wawancara dilakukan menggunakan enam pertanyaan terbuka yang mencakup pengalaman selama banjir dan evaluasi terhadap respons Dinas Sosial serta persepsi pemerataan bantuan. Peran TAGANA dan perhatian pada rehabilitasi sosial-psikologis serta aspirasi masyarakat untuk perbaikan layanan. Narasumber diberi keleluasaan menjelaskan pengalaman secara bebas dan rinci.

Hasil wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan kesamaan maupun perbedaan pandangan antarnarasumber. Teknik ini sejalan dengan pandangan (Moleong, 2018) bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti membangun hubungan interpersonal dengan informan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan autentik serta relevan. Berdasarkan prinsip tersebut, penulis menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai acuan dalam wawancara.

Tabel 2

Status narasumber yang akan diwawancarai berkaitan dengan banjir di Parittiga

NO	NAMA	KETERANGAN NARASUMBER
1	AAR	Laki-Laki, 24 tahun, Belum Menikah, Tempat Tinggal di Ds. Puput, Bangka Barat

2	AR	Laki-Laki, 40 tahun, Sudah Menikah, Tempat Tinggal di Ds. Puput, Bangka Barat
3	NA	Perempuan, 25 tahun, Belum Menikah, Tempat Tinggal di Ds. Puput, Bangka Barat
4	CDL	Perempuan, 38 Tahun, Sudah Menikah, Tempat Tinggal di Desa Sekar Biru, Bangka Barat
5	HB	Laki-Laki, 36 Tahun, Sudah Menikah, Tempat Tinggal di Desa Sekar Biru, Bangka Barat
6	HM	Laki-Laki, 45 Tahun, Sudah Menikah, Tempat Tinggal di Desa Puput, Bangka Barat
7	EPS	Perempuan, 37 Tahun, Sudah Menikah, Tempat Tinggal di Desa Puput, Bangka Barat

Sumber : Data Primer

Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan ketersediaan mereka untuk diwawancarai serta pengalaman langsung sebagai warga yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Parittiga. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan pengalaman autentik masyarakat dalam menghadapi situasi bencana. Penelitian dilaksanakan selama satu minggu pada tanggal 21 hingga 27 Oktober 2025 diharapkan dapat mengekstrak informasi yang mendalam dan akurat.

Selain data lapangan bahwa penelitian ini juga didukung studi kepustakaan untuk memperkuat analisis. Literatur yang digunakan mencakup jurnal nasional terkait pelayanan publik dan manajemen kebencanaan

yang termasuk tiga referensi utama. Berbagai penelitian menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah program One Agency One Innovation di Kabupaten Wajo yang mendorong setiap instansi menciptakan inovasi pelayanan publik efektif dan berkelanjutan. Inisiatif ini terbukti meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan inovatif yang sesuai kebutuhan lokal (Syam, Patmasari, & Anugrah, 2021).

Penelitian (Putra & Alhadi, 2019) menyoroti kinerja Dinas Sosial Kota Padang dalam penanggulangan bencana dan menemukan bahwa efektivitas manajemen kebencanaan masih terkendala koordinasi serta implementasi kebijakan. Sementara itu dalam penelitian (Irtanto, 2022) menunjukkan bahwa TAGANA memiliki peran aktif dan kesiapsiagaan yang baikakan tetapi efektivitas tugas mereka belum optimal karena keterbatasan regulasi dan fasilitas pendukung di tingkat daerah. Berdasarkan tinjauan kepustakaan dari penelitian terdahulu bahwa penulis dapat melakukan analisis yang lebih mendalam. Data diperoleh dari jurnal yang diakses melalui Google Scholar dan Mendeley serta buku relevan di Google Books hingga artikel terpercaya terkait isu serupa. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan memperkuat analisis sehingga penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat dan relevan dengan perkembangan literatur terbaru (Wibowo & Lestari, 2020).

D. Hasil Penelitian

A. Hasil Penelitian

1. Respons Cepat dalam Tahap Tanggap Darurat

AAR (24) menjelaskan bahwa proses tanggap darurat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat berlangsung sangat cepat. Ia menyampaikan pengalamannya saat banjir terjadi dengan berkata bahwa “Ketika banjir melanda, pihak Dinas Sosial bersama TAGANA langsung turun ke lapangan. Mereka membantu evakuasi warga dan segera mendirikan dapur umum” tuturnya. Ia kemudian menambahkan bahwa “Bantuan makanan juga datang dengan cepat, dan itu sangat membantu masyarakat yang terdampak.” (Wawancara, 21 Oktober 2025).

AR (40) menyatakan bahwa respons Dinas Sosial dan TAGANA selama masa tanggap darurat berjalan cukup baik yang terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi. Ia menjelaskan pengamatannya dengan mengatakan bahwa “Menurut saya, koordinasinya sudah bagus. Petugas dari berbagai instansi bisa bekerja sama dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa “Kerja sama seperti itu membuat penanganan di lapangan jadi lebih cepat dan lebih terarah.” (Wawancara, 21 Oktober 2025).

NA (25) juga memberikan pendapat serupa mengenai efektivitas koordinasi lintas instansi. Ia menyampaikan pengalamannya dengan berkata bahwa “Menurut saya, koordinasinya sangat efektif. Banyak pihak terlibat dan semuanya bergerak cepat,” ujarnya. Ia kemudian menambahkan “Karena kerja sama itu, proses evakuasi dan penyaluran bantuan jadi lebih terarah dan bisa dilakukan dengan cepat.” (Wawancara, 21 Oktober 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respons tanggap darurat Dinas Sosial dan TAGANA dinilai sangat cepat dan terkoordinasi dengan baik. AAR menilai petugas sigap dalam evakuasi dan penyaluran bantuan. AR dan NA memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan bahwa koordinasi antarinstansi berjalan efektif hasilnya penanganan di lapangan menjadi lebih cepat dan terarah. Secara keseluruhan bahwa para informan memandang respons tanggap darurat berlangsung baik berkat kecepatan dan koordinasi yang solid.

Berdasarkan hasil observasi bahwa peneliti melihat pendirian posko bantuan dan dapur umum berlangsung dengan koordinasi yang solid antara Dinas Sosial dan TAGANA serta masyarakat. Seluruh pihak bekerja sigap melalui komunikasi aktif dan pembagian tugas yang jelas untuk memenuhi kebutuhan

dasar penyintas. Masyarakat turut membantu dalam pengelolaan logistik dan evakuasi yang menunjukkan solidaritas dan gotong royong yang kuat. Interaksi yang hangat dan saling mendukung menggambarkan bahwa penanganan bencana berjalan efektif berkat perpaduan antara koordinasi institusional dan partisipasi komunitas.

Peneliti berpendapat bahwasanya kecepatan respons ini menggambarkan tingkat kesiapsiagaan yang baik akan tetapi masih diperlukan penguatan dalam mekanisme dokumentasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat agar data bantuan dan penerima lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1. Dapur Umum TAGANA di Kecamatan Parittiga



Sumber : Data Primer

2. Peran Aktif TAGANA dalam Pelayanan Logistik

CDL (38) menyampaikan bahwa TAGANA berperan sebagai ujung tombak dalam penyediaan dan penyaluran logistik bagi korban banjir. Ia menjelaskan pengalamannya dengan mengatakan bahwa “TAGANA yang mengurus logistik. Mereka masak di dapur umum lalu makanan itu diantar langsung ke rumah warga yang tidak bisa mengungsi,” tuturnya. Ia kemudian menambahkan bahwa “Dengan cara itu kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi. TAGANA memang sangat sigap menangani keadaan darurat seperti ini.” (Wawancara, 22 Oktober 2025).

Berdasarkan Hasil wawancara menurut perspektif CDL (38) dan peran TAGANA dalam penanganan banjir sangat penting karena mereka menjadi ujung tombak dalam penyediaan dan distribusi logistik bagi warga terdampak. Ia menilai bahwa kinerja TAGANA tidak hanya terlihat dari kesiapan mereka mengelola dapur umum akan tetapi juga dari upaya langsung mengantarkan makanan kepada warga yang tidak dapat mengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa TAGANA mampu memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi darurat. Dari wawancara tersebut jelas bahwa informan memandang TAGANA sebagai pihak yang bekerja cepat dan tanggap hingga sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan bantuan bagi korban banjir.

Berdasarkan hasil observasi bahwa peneliti melihat bahwa TAGANA sangat aktif dalam pengelolaan logistic yang mulai dari pengumpulan bahan makanan dan pengolahan di dapur umum hingga distribusi

kepada warga terdampak. Kegiatan mereka berlangsung terstruktur dengan komunikasi yang tegas dan gerakan kerja yang cekatan. Ini menunjukkan koordinasi yang efektif terlihat dari memastikan ulang jumlah dan kondisi logistic serta mencerminkan adanya kepedulian sosial yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja TAGANA didorong oleh dua pola utama yaitu kerja yang sistematis dan kepedulian komunitas yang bersama-sama memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara tepat waktu.

Peneliti berpendapat bahwasanya TAGANA memiliki peran vital sebagai pelaksana teknis di lapangan tetapi tetap diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur antara TAGANA dan Dinas Sosial agar pendistribusian bantuan dapat berlangsung lebih optimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

GAMBAR 2. Penyaluran Logistik Korban Banjir di Kecamatan Parittiga



Sumber : Data Primer

3. Ketidakteraturan dalam Distribusi Bantuan

HB (36) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses pembagian bantuan. Ia menjelaskan pengalamannya dengan mengatakan bahwa “Ada warga yang dapat bantuan sampai dua kali sementara yang lain belum kebagian sama sekali” ujarnya. Ia menilai bahwa masalah tersebut terjadi karena pendataan yang kurang jelas dan lalu menambahkan “Pendataannya masih kurang rapi sehingga distribusinya tidak sesuai.” (Wawancara, 23 Oktober 2025).

HM (45) menambahkan bahwa distribusi bantuan tidak selalu merata akibat minimnya koordinasi di tingkat desa. Ia menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan bahwa “Kadang koordinasinya di tingkat desa kurang baik sehingga pembagian bantuannya tidak merata” ujarnya. Ia kemudian menambahkan “Sering juga informasi antarpetugas tidak sinkron karena itu bantuan tidak selalu tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.” (Wawancara, 23 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pendistribusian bantuan masih menghadapi kendala signifikan. HB (36) menilai ketidaktepatan pembagian bantuan disebabkan pendataan yang kurang rapi sementara HM (45) menyoroti lemahnya koordinasi di tingkat desa dan informasi antarpetugas yang tidak sinkron. Kedua informan sepakat bahwa kelemahan pendataan dan koordinasi menjadi faktor utama terhambatnya pemerataan bantuan bagi korban bencana.

Berdasarkan hasil observasi bahwa peneliti melihat bahwa proses pendistribusian bantuan di lapangan masih kurang teratur akibat tidak adanya pendataan yang terintegrasi. Di beberapa titik terlihat petugas saling memeriksa ulang informasi terkait jumlah dan penerima bantuan yang menunjukkan kebingungan dan ketidaksinkronan data antarpetugas desa. Perbedaan informasi mengenai wilayah prioritas juga menyebabkan keterlambatan penyaluran dan berpotensi menimbulkan duplikasi penerimaan. Temuan ini

menunjukkan bahwa kelemahan koordinasi dan sistem pencatatan yang kurang rapi masih menjadi hambatan sehingga diperlukan perbaikan agar penyaluran bantuan lebih merata dan tepat sasaran.

Peneliti berpendapat bahwasanya ketidakteraturan tersebut menunjukkan perlunya sistem pendataan terpadu serta transparansi dalam manajemen logistik agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan merata.

4. Kurangnya Pemulihan Sosial dan Psikologis Korban

NA (25) setelah banjir surut bahwa perhatian terhadap kondisi psikologis warga masih sangat minim. Ia menuturkan pengamatannya dengan berkata “Banyak anak-anak yang mengalami trauma. Mereka takut setiap kali hujan turun” ujarnya. Ia kemudian menambahkan bahwa “Sampai sekarang belum ada pendampingan psikologis dari pihak terkait padahal itu sangat dibutuhkan.” (Wawancara, 21 Oktober 2025). Berdasarkan hasil wawancara NA (25) menilai penanganan pascabencana masih kurang memperhatikan kondisi psikologis warga. Ini terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat banjir. Hingga saat wawancara bahwa belum ada pendampingan psikologis dari pihak terkait sehingga diperlukan intervensi psikososial yang lebih terarah untuk membantu pemulihan warga.

Berdasarkan hasil observasi bahwa peneliti melihat bahwa masyarakat masih menunjukkan kecemasan pascabencana. Ini terlihat dari perilaku menghindari aktivitas luar rumah saat cuaca mendung dan kewaspadaan berlebihan terhadap kemungkinan banjir ulang. Ekspresi tegang dan respons tubuh yang kaku menunjukkan dampak emosional yang belum pulih. Selain itu adalah tidak ditemukan layanan konseling seperti pendampingan psikososial atau trauma healing dari instansi terkait dan warga mengaku belum pernah menerima dukungan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kecemasan masyarakat masih berlanjut sementara intervensi psikologis belum menjadi prioritas sehingga kebutuhan dukungan mental tetap mendesak.

Peneliti berpendapat bahwasanya kelemahan dalam penanganan pemulihan sosial dapat menghambat keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pascabencana. Dinas Sosial perlu melibatkan tenaga profesional seperti pekerja sosial dan psikolog komunitas untuk memberikan pendampingan lanjutan yang lebih komprehensi.

5. Kurangnya Integrasi dalam Pemberdayaan Pascabencana

AAR (24) menyampaikan bahwa setelah proses penyaluran bantuan selesai. Belum terlihat adanya tindak lanjut berupa pelatihan atau program pemulihan ekonomi bagi warga. Ia menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan bahwa “Setelah bantuannya selesai dibagikan bahwa saya belum melihat ada pelatihan atau program pemulihan ekonomi” ujarnya. Ia kemudian menambahkan, “Begitu banjir surut lalu masyarakat langsung kembali ke aktivitas seperti biasa dengan tanpa ada program dari Dinas Sosial untuk membantu pemulihan usaha mereka.” (Wawancara, 21 Oktober 2025).

CDL (38) juga menyampaikan hal serupa. Ia menuturkan pengamatannya dengan berkata “Setelah masa tanggap darurat selesai maka tidak ada pemberdayaan atau pelatihan lanjutan yang diberikan” ujarnya. Ia kemudian menambahkan, “Jadi warga tidak mendapat dukungan tambahan untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka setelah bencana.” (Wawancara, 22 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa tahap pemulihan ekonomi pascabencana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak terkait. AAR (24) menilai bahwa setelah proses penyaluran bantuan selesai maka tidak ada tindak lanjut berupa pelatihan atau program pemberdayaan yang dapat membantu warga memulihkan usaha dan mata pencaharian mereka. Penilaian ini diperkuat oleh CDL (38) yang juga mengamati bahwa tidak ada kegiatan pemberdayaan atau pelatihan lanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir. Dari perspektif kedua informan tersebut bahwa jelas ketiadaan program pemulihan

ekonomi menjadi salah satu kelemahan dalam penanganan pascabencana. Ini karena masyarakat kembali beraktivitas tanpa dukungan tambahan untuk membangun kembali kondisi ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi pascabencana belum terlaksana secara sistematis yang terlihat dari tidak adanya pelatihan kerja dan pendampingan usaha mikro maupun pembentukan kelompok usaha. Warga juga tampak bingung ketika ditanya mengenai program pemberdayaan yang menunjukkan bahwa belum ada intervensi terencana untuk memulihkan mata pencaharian mereka. Penanganan pascabencana masih terfokus pada kebutuhan dasar sementara persoalan ekonomi belum menjadi prioritas. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan program pemberdayaan dan minimnya identifikasi kebutuhan ekonomi warga menjadi hambatan utama dalam mengembalikan kemandirian masyarakat pascabencana.

Peneliti berpendapat bahwasanya kurangnya integrasi antara penanganan darurat dan program pemberdayaan sosial menjadi celah signifikan dalam kesinambungan pelayanan. Dinas Sosial perlu memperkuat pendekatan berbasis pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek tetapi memiliki kemampuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

6. Struktur Kelembagaan yang Masih Bersifat Top-Down

EPS (37) menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan pascabencana umumnya ditentukan di tingkat kabupaten. Ia menyampaikan hal tersebut dengan mengatakan bahwa “Biasanya program itu sudah disusun dari atas yaitu dari kabupaten,” ujarnya. Ia kemudian menambahkan “Kami di lapangan hanya menjalankan saja dan tidak terlibat dalam proses perumusannya.” (Wawancara, 27 Oktober 2025).

HM (45) juga menyampaikan hal serupa bahwa keputusan terkait program pascabencana lebih banyak berasal dari Dinas Sosial. Ia menjelaskan hal tersebut dengan berkata bahwa “Biasanya program-program pascabencana itu diputuskan langsung oleh Dinas Sosial” ujarnya. Ia kemudian menambahkan bahwa “Masyarakat dan lembaga lokal jarang dilibatkan sehingga kebutuhan khusus di daerah sering tidak terakomodasi.” (Wawancara, 23 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses perencanaan program pascabencana masih bersifat top-down dan kurang melibatkan pihak lokal. EPS (37) menjelaskan bahwa berbagai program pemulihan umumnya ditetapkan langsung di tingkat kabupaten. Sementara itu petugas di lapangan hanya bertugas melaksanakan tanpa terlibat dalam penyusunannya. Hal ini sejalan dengan pendapat HM (45) yang menegaskan bahwa keputusan terkait program pascabencana lebih banyak dibuat oleh Dinas Sosial tanpa melibatkan masyarakat maupun lembaga lokal. Akibatnya adalah kebutuhan spesifik di daerah sering kali tidak terakomodasi dengan baik. Berdasarkan pandangan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi lokal menjadi salah satu kelemahan utama dalam perencanaan pascabencana.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam penyusunan program pascabencana masih bersifat hierarkis yang didominasi oleh Dinas Sosial dan minimnya pelibatan masyarakat maupun lembaga lokal. Perangkat desa tampak lebih berperan sebagai pelaksana teknis dan menunjukkan sikap pasif ketika membahas perencanaan serta menandakan terbatasnya ruang dialog. Tidak tampak forum konsultasi yang memungkinkan aspirasi masyarakat tersampaikan secara formal, sehingga proses perencanaan berjalan satu arah. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan top-down masih kuat dan pelibatan aktor lokal belum optimal sehingga dapat mengurangi kesesuaian dan efektivitas program pemulihan di lapangan.

Peneliti berpendapat bahwasanya bahwa pola top-down seperti ini berpotensi menghambat efektivitas program pemulihan sosial karena kebutuhan lokal tidak sepenuhnya dipertimbangkan maka diperlukan

mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap awal agar program lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

E. Pembahasan

1. Respons Cepat dalam Tahap Tanggap Darurat

Temuan pertama menunjukkan bahwa respons cepat Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat pada masa tanggap darurat sejalan dengan prinsip adaptasi sosial dalam teori Sosiologi Kebencanaan. Bencana dipahami sebagai fenomena sosial yang menuntut respons kolektif melalui koordinasi institusional (Dynes, 1998). Kecepatan evakuasi dan pendirian posko hingga penyediaan bantuan makanan mencerminkan fungsi adaptif lembaga dalam menghadapi krisis. Hal ini ditegaskan oleh pandangan bahwa efektivitas struktur sosial diuji di situasi darurat (Turner, 2014). Tetapi berkurangnya intensitas layanan saat fase rehabilitasi menunjukkan keterbatasan birokrasi dalam mempertahankan kolaborasi jangka panjang (Hardiansyah & Undang, 2023). Kondisi ini menandakan perlunya penguatan mekanisme koordinasi yang tidak hanya responsif pada fase awal akan tetapi juga berkelanjutan pada tahap pascabencana.

2. Peran Aktif TAGANA dalam Pelayanan Logistik

Temuan kedua memperlihatkan implementasi prinsip emergent group behavior yaitu munculnya kelompok relawan yang bergerak spontan memenuhi kebutuhan sosial dalam kondisi darurat (Dynes, 1998). Keterlibatan TAGANA dalam pendirian dapur umum dan mendistribusikan makanan menunjukkan solidaritas sosial serta kolaborasi antara lembaga formal dan komunitas (Lestari & Firmansyah, 2022). Meskipun demikian bahwa koordinasi yang lebih terstruktur antara TAGANA dan Dinas Sosial diperlukan untuk mencegah tumpang tindih distribusi. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen bencana berbasis komunitas yang menekankan pentingnya kolaborasi antar-pihak dan peran aktif masyarakat (Turner, 2014; Suwarno, 2020). Dengan demikian maka penguatan koordinasi dan sistem logistik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas respons bencana.

3. Ketidakteraturan dalam Distribusi Bantuan

Temuan ketiga mengenai ketidakteraturan distribusi bantuan menggambarkan adanya persoalan transparansi dan akuntabilitas yang berpotensi memengaruhi persepsi keadilan publik. Krisis dapat muncul ketika lembaga gagal mengelola informasi dan membangun kepercayaan masyarakat (Turner, 2014). Temuan ini diperkuat oleh (Prasetyo & Yuliani, 2021) yang menegaskan pentingnya sistem pendataan terpadu sebagai dasar distribusi bantuan yang adil dan akuntabel. Penerapan pelaporan berbasis digital serta pelibatan aparat desa menjadi strategi adaptif penting guna menjaga kredibilitas layanan publik dan menghindari ketimpangan di lapangan.

4. Kurangnya Pemulihan Sosial dan Psikologis Korban

Temuan keempat menunjukkan lemahnya pemulihan sosial dan psikologis pascabencana yang terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Lembaga sosial memiliki peran kunci dalam mengembalikan rasa aman dan stabilitas sosial (Dynes, 1998). Kurangnya layanan pendampingan psikososial menunjukkan bahwa fungsi stabilisasi tersebut belum dijalankan secara optimal. Hal ini sejalan dengan (Dwiyanto, 2018) yang menyatakan bahwa institusi publik perlu meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada pemulihan kesejahteraan sosial. Dengan demikian bahwa kolaborasi dengan psikolog komunitas serta pekerja sosial diperlukan untuk memperkuat pemulihan psikososial masyarakat terdampak bencana.

5. Kurangnya Integrasi dalam Pemberdayaan Pascabencana

Temuan kelima menunjukkan belum adanya integrasi memadai antara penanganan darurat dan pemberdayaan sosial. Pemulihan pascabencana seharusnya mencakup rekonstruksi sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat (Turner, 2014). Ketiadaan program ekonomi dan pelatihan kerja hingga pemberdayaan menunjukkan celah dalam kesinambungan layanan sosial. Penelitian (Rahmawati, 2021) serta (Syam, Patmasari, & Anugrah, 2021) menegaskan bahwa inovasi program sosial-ekonomi berperan penting dalam

meningkatkan adaptasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Karena itu bahwa penguatan program pemberdayaan pascabencana menjadi prioritas agar masyarakat mampu memulihkan kondisi sosial-ekonomi secara mandiri.

6. Struktur Kelembagaan yang Masih Bersifat Top-Down

Temuan keenam memperlihatkan bahwa penanganan pascabencana masih dilakukan secara top-down. Padahal, keberhasilan manajemen bencana sangat bergantung pada partisipasi masyarakat pada setiap tahap penanganan (Turner, 2014). Minimnya pelibatan masyarakat membuat program pemulihan kurang sesuai kebutuhan lokal. Pandangan ini selaras dengan (Osborne & Gaebler, 2017) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Oleh karena itu maka mekanisme perencanaan partisipatif dan forum komunikasi local serta kelompok kerja berbasis komunitas. Ini perlu diperkuat untuk menghasilkan program pemulihan yang relevan dan efektif maupun berorientasi pada ketangguhan sosial (Dynes, 1998).

Secara keseluruhan bahwa keenam temuan menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat memiliki kekuatan pada fase tanggap darurat yang terutama dalam respons cepat dan mobilisasi TAGANA. Namun sejumlah tantangan masih perlu dibenahi seperti keberlanjutan program dan koordinasi logistic serta transparansi pendataan hingga pemulihan psikososial. Selain itu juga perlu pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam perencanaan. Integrasi teori Sosiologi Kebencanaan dengan temuan lapangan menegaskan perlunya transformasi kelembagaan menuju manajemen bencana yang adaptif dan kolaboratif serta partisipatif. Dengan demikian maka efektivitas lembaga tidak hanya diukur dari kecepatan respons teknis akan tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan publik serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat terdampak bencana.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan temuan penelitian. Pertama yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat menunjukkan respons cepat dalam tahap tanggap darurat yang didukung oleh koordinasi antarinstansi dan peran aktif TAGANA dalam penyediaan serta distribusi logistik. Evakuasi warga dan pendirian posko hingga dapur umum berjalan efektif yang menunjukkan kemampuan adaptasi sosial lembaga dalam menghadapi bencana. Meski demikian mekanisme dokumentasi dan pelaporan kegiatan masih perlu diperkuat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Kedua yaitu terdapat kelemahan dalam distribusi bantuan dan pemulihan sosial serta psikologis atau pemberdayaan pascabencana. Ketidakteraturan distribusi menunjukkan perlunya sistem pendataan terpadu dan transparansi. Minimnya pemulihan psikososial dan pemberdayaan ekonomi menimbulkan kesenjangan keberlanjutan pelayanan. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pekerja sosial dan psikolog komunitas maupun penerapan program sosial-ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pascabencana.

Ketiga yaitu struktur kelembagaan yang bersifat top-down membatasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pascabencana. Pendekatan hierarkis ini berpotensi menurunkan efektivitas program pemulihan sosial. Diperlukan mekanisme partisipatif dan forum komunikasi serta integrasi peran masyarakat. Dengan adanya tahapan penanganan bencana untuk menciptakan manajemen bencana yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada ketahanan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat disarankan memperkuat koordinasi dengan TAGANA dan instansi terkait. Dengan menerapkan sistem dokumentasi berbasis data serta meningkatkan pemulihan sosial dan psikologis korban melalui pendampingan profesional. Selain itu perlunya program pemberdayaan masyarakat pascabencana seperti pelatihan keterampilan dan usaha mikro perlu dilaksanakan secara terstruktur. Ini disertai pendekatan partisipatif agar masyarakat terlibat aktif dan kapasitas internal Dinas

Sosial ditingkatkan melalui pelatihan manajemen bencana serta sistem logistik terpadu untuk mendukung kesiapsiagaan dan keberlanjutan layanan.

Peningkatan kapasitas relawan dan aparat melalui pelatihan berbasis teknologi serta kolaborasi antarinstansi dan lembaga lokal perlu dilakukan untuk mencapai layanan sosial yang efektif dan transparan maupun berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas lokasi kajian dan menerapkan metode campuran hingga menganalisis kebijakan serta koordinasi antarinstansi. Selain itu meneliti inovasi digital dalam pelaporan bantuan serta melakukan studi komparatif dengan lembaga lain seperti BPBD dan PMI.

F. Daftar Pustaka

Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, F. A. G., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, R., Mesra, R., Sari, M. N., & Tuerah, P. R. (2023). Metode penelitian kualitatif: Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif. PT Mifandi Mandiri Digital.

Dwiyanto, A. (2020). Pelayanan publik: Manajemen pelayanan publik peduli inklusif dan kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dynes, R. R. (1998). Sociology of disaster: Theoretical approaches. Disaster Research Center, University of Delaware.

Hardiansyah, M., & Undang, G. (2023). Evaluasi kinerja pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Jurnal Perceka, 1(2), 98–103.

Herdi Syam, Patmasari, E., & Anugrah, A. (2021). Analisis program One Agency One Innovation dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Wajo. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 29–47.

Hidayat, R., & Rahmawati, D. (2022). Analisis kerentanan wilayah pesisir dan dataran rendah terhadap bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Geografi dan Lingkungan, 9(2), 101–113.

Irtanto. (2022). Evaluasi peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana alam. Jurnal Manajemen Bencana Indonesia, 4(1), 44–58.

Lestari, N., & Firmansyah, R. (2022). Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam meningkatkan efektivitas pelayanan sosial pascabencana. Jurnal Manajemen Bencana Indonesia, 4(1), 44–58.

Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurhayati, S., & Prabowo, T. (2020). Evaluasi program penanggulangan dampak sosial pascabencana di Indonesia: Pendekatan efektivitas dan relevansi kebijakan. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(2), 145–158.

Osborne, D., & Gaebler, T. (2017). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. New York, NY: Plume.

Prasetyo, A., & Yuliani, R. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial pada situasi darurat bencana. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi, 8(3), 201–213.

- Putra, A. I., & Alhadi, Z. (2019). Analisis kinerja Dinas Sosial Kota Padang dalam penanggulangan bencana di Kota Padang (suatu studi manajemen kebencanaan). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 105–112.
- Putri, M. A., & Santosa, B. (2021). Peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial pascabencana banjir: Studi kasus penanganan korban di daerah rawan banjir. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 45–58.
- Rahmawati, E. (2021). Inovasi pelayanan sosial pascabencana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pelayanan Publik dan Sosial*, 6(2), 89–104.
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). *Modal sosial dalam manajemen bencana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, R., & Handayani, N. (2021). Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana dan pemulihan sosial masyarakat terdampak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 55–66.
- Sutanto, A., & Mulyana, D. (2020). Dampak aktivitas penambangan terhadap perubahan tata air dan risiko banjir di Pulau Bangka. *Jurnal Geografi Tropis*, 8(2), 95–107.
- Suwarno. (2020). *Manajemen penanggulangan bencana berbasis masyarakat*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Turner, J. H. (2014). *The structure of sociological theory*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Wibowo, H., & Lestari, D. (2020). Pendekatan studi kepustakaan dalam penelitian sosial: Analisis teori dan praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 112–124.
- Yuliani, R., & Fadillah, A. (2020). Analisis sosial ekonomi masyarakat terdampak banjir di wilayah pertambangan timah Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pembangunan*, 6(2), 120–132.